

CaLK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN

2024



Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Provinsi Maluku Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Akhir Tahun untuk Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 dalam mendukung upaya penerapan akuntabilitas dan transparansi yang terkendali.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, sehingga saran dan kritik serta masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan laporan di tahun yang akan datang.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pejabat dan staf Dinas Komunikasi Informatika serta Persandian Provinsi Maluku Utara yang telah bekerja keras dan memberikan dukungan penuh dalam penyusunan laporan ini.

Sofifi, 08 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Provinsi Maluku Utara,



Drs. K. SAN R. A. ARSAD, M.SI

NIP. 19691107 200112 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024	2
1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN.....	4
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	4
2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target	6
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	7
3.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	7
3.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	13
3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	19
3.4 Laporan Perubahan Ekuitas	25
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pertanggung- jawaban serta transparansi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sehingga laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara, yaitu:

1. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2024.
2. Menyediakan informasi mengenai manajemen pengelolaan keuangan
3. Menyediakan informasi mengenai kepemilikan dan pengelolaan asset
4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
5. Menyediakan informasi mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan
6. Menyediakan informasi Neraca Per 31 Desember 2024
7. Menyediakan informasi mengenai perubahan dan penyusutan aset tetap
8. Menyediakan data laporan keuangan konsolidasian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara pada tingkat Bendahara Umum Daerah (BUD) di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Tahun 2005 Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan OPD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024, landasan hukum dan sistematika catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD, menjelaskan tentang Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD dan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos-Pos Neraca, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos laporan keuangan, yaitu Aset, Kewajiban dan Ekuitas, serta pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Bab IV Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1 Belanja Daerah

Target belanja Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara adalah sebesar Rp. 17.830.629.585,00 realisasinya mencapai 99,28 % atau sebesar Rp. 17.852.054.341,00 Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp. 17.736.723.341,00 atau 99,28 % sedangkan Belanja Modal sebesar Rp 115.331.000,00 atau 99,65 %.

Proporsi belanja operasi Tahun Anggaran 2024 terdiri dari belanja pegawai Rp. 5.287.029.360,00 atau 98,43 %, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 12.099.693.981,00 atau 99,64 %.

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2024 sebesar Rp.5.287.029.360,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 4.334.578.641,00 mengalami Kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp. 952.450.719,00 atau 98.43 %;

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 12.099.693.981,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp.7.765.538.978,00 mengalami kenaikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.12.099.693.981,00 atau 99,64%;

Pada komponen belanja modal tahun anggaran 2024, dianggarkan sebesar Rp.115.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 115.331.000,00 atau 99,65 %, Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 598.994.604,00 realisasi Tahun Anggaran 2023 Belanja Modal mengalami Kenaikan belanja sebesar (Rp. 483.663.604,00) atau (99,65 %).

Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	145.518.900,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	134.425.000,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	83.640.200,00
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	208.710.000,00
2	Administras Keuangan Perangkat Daerah	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	5.250.800.286,00
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	120.720.000,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	200.000.000,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	37.400.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	88.020.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	100.000.000,00
	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	329.931.000,00
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	980.291.600,00

6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	99.500.000,00	99.458.000,00
	<i>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</i>	2.783.300,00	2.783.300,00,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	521.000.000,00	521.000.000,00

2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

Permasalahan dalam upaya peningkatan Belanja daerah antara lain:

1. Penyerapan anggaran.tahun ini sangat baik di sandingkan dengan tahun lalu
2. Dengan Adanya Aplikasi SIPD Mempermudah dalam Pelaporan
3. Belum optimalnya pengelolaan aset;

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan system kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada Laporan Keuangan yang terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2024. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024.

3.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rencana keuangan tahunan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024. adalah sebagai berikut:

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN	0,00	0,00		0,00
BELANJA	17.980.629.585,00	17.852.054.341,00	99,28	12.699.112.223,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(17.980.629.585,00)	(17.852.054.341,00)	99,28	(12.699.112.223,00)
PEMBIAYAAN :				
- Penerimaan Pembiayaan				
- Pengeluaran Pembiayaan				
PEMBIAYAAN NETO				
SILPA				

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara tidak memiliki sumber pendapatan sendiri yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran 2024.

B. Belanja Daerah

Belanja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan jenisnya terdiri dari belanja operasi, dan belanja modal. Jumlah realisasi belanja sebesar Rp.17.852.054.341,00 atau 99,65% dari anggaran belanja sebesar Rp Rp.17.852.054.341,00 dan realisasi TA 2023 sebesar Rp. 12.699.112.223,00 belanja daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	2024			2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	17.864.889.585,00	17.736.723.341,00	99,28	12.100.117.619,00
Belanja Modal	115.740.000,00	115.331.000,00	99,65	598.994.604,00
Jumlah	17.980.629.585,00	17.852.054.341	99,28	12.699.112.223

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp17.980.629.585,00 realisasi belanja tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan belanja sebesar Rp 5.281.517.362,00 atau 99,28%.

1) Belanja Operasi

Realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.17.852.054.341,00 atau 99,28% dari anggaran Rp.17.980.629.585,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024			2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	5.371.520.286,00	5.287.029.360,00	98,43	4.334.578.641
Belanja Barang dan Jasa	12.143.369.299,00	12.099.693.981,00	99,64	7.765.538.978,00
Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	17.864.889.585,00	17.736.723.341,00	99,28	12.100.117.619,00

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 12.699.112.223,00 realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan Belanja Operasi sebesar Rp 5.636.605.722,00 atau 46,58 %.

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.287.029.360,00 atau 98,43 % dari anggaran Rp.5.371.520.286,00, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok ASN	2.229.938.473	2.229.142.073	99,96
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	213.031.124	207.984.328	97,63
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	184.100.000	184.100.000	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.520.000	11.220.000	97,40
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	81.830.000	81.830.000	100,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	131.876.820	131.876.820	99,96

Catatan atas Laporan Keuangan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Provinsi Maluku Utara

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.961.586	4.961.586	100,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	34.009	34.009	100,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	93.460.809	93.460.809	100,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.603.986	4.603.986	100,00
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	13.811.974	13.811.974	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.281.631.505	2.203.283.775	96,57
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	120.720.000	120.720.000	100,00
Jumlah	5.371.520.286	5.287.029.360	98,43

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.009.693.981,00 atau 99,64% dari anggaran Rp12.143.369.299,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.765.538.978,00 realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.244.155.003,00 atau 54,65%.

Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	262.244.400	259.815.100	99,07
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	38.900	0	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	163.762.000	160.659.000	98,11
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	110.000.000	110.000.000	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Provinsi Maluku Utara

Lainnya			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	62.040.000	55.040.000	88,72
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	149.966.417	149.966.417	100,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	9.000.000	9.000.000	100,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	99.999.900	99.999.900	100,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	640.900.000	640.900.000	100,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	216.000.000	216.000.000	100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.949.894.000	1.949.540.094	99,98
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.204.742.582	2.199.094.510	99,74
Belanja Lembur	170.700.000	170.700.000	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	43.265.000	40.015.000	92,49
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	28.320.000	28.320.000	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	492.719.000	492.679.900	99,99
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.036.579.000	3.020.238.798	99,46
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.130.000	15.130.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	135.460.000	135.400.000	99,96
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.000.000	2.000.000	100,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	120.000.000	120.000.000	100,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	180.000.000	180.000.000	100,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	77.163.900	77.122.700	99,95
Belanja Sewa Komputer Jaringan	1.315.594.200	1.315.322.562	99,98
Belanja Tagihan Listrik	5.100.000	0	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	130.150.000	130.150.000	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	498.000.000	498.000.000	100,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola	24.600.000	24.600.000	100,00

Teknologi Informasi dan Pengelola Website			
--	--	--	--

c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp350.000.000,00 atau 100% dari anggaran Rp350.000.000,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan Belanja Belanja Hibah sebesar Rp350.000.000,00 atau 100,00%.

Belanja Hibah tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	350.000.000	350.000.000	100,00

2) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Objek belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja Aset Tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Jumlah realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp115.331.000,00 atau 99,65% dari anggaran Rp115.740.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp598.994.604,00 Uraian rincian objek belanja modal selama Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut

:

Uraian	2024			2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.500.000	99.458.000	99,96	598.994.604,00
Belanja Modal Aset Lainnya	16.240.000	15.873.000	97,74	0,00
Jumlah	115.740.000	115.331.000	99,65	598.994.604,00

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

Uraian	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	107.198.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor	0,00	449.486.004,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	61.443.100,00	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	38.115.500,00	0,00
Jumlah	157.148.000,00	598.994.604,00	381,17

3.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
Aset	9.622.924.383,00	9.507.593.383,00
Kewajiban	1.353.131.832,00	1.353.131.832,00
Ekuitas	8.269.792.551,00	8.154.461.551,00

3.2.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk peyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Melihat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Jumlah Aset tahun 2024 sebesar Rp9.622.924.383,00 dan tahun 2023 sebesar Rp9.507.593.383 mengalami Kenaikan sebesar Rp115.331.000,00 atau 1,21%, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset Lancar	13.333.333	13.333.333
Aset Tetap	9.593.718.050	9.494.260.050
Aset Lainnya	15.873.000	0
Jumlah	9.622.924.383	9.507.593.383

I. **Penjelasan Laporan Realisasi Aset Lancar** **Rp13.333.333,00**

Aset lancar sejumlah tersebut merupakan saldo aset lancar Per 31 Desember 2024, terdiri dari :

A. Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp0,00**

B. Piutang **Rp13.333.333,00**

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya Per 31 Desember 2024 Rp13.333.333,00 yang berasal dari tahun 2023.

C. Beban Dibayar Dimuka **Rp0,00**

D. Persediaan **Rp0,00**

II. Aset Tetap **Rp9.593.718.050,00**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu Periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, Pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Aset Tetap Pemerintah yang tercatat pada OPD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2024	2023
1	Peralatan dan Mesin	8.308.493.085	8.209.035.085
2	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.667.430.000	1.667.430.000
3	Aset Tetap Lainnya	428.664.000	428.664.000
4	Akumulasi Penyusutan	-810.869.035	-810.869.035
JUMLAH		9.593.718.050	9.494.260.050

1) Peralatan dan Mesin Rp8.308.493.085,00

Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.308.493.085,00 merupakan nilai Perolehan Per 31 Desember 2024 yang belum dikurangi akumulasi penyusutan. yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Mutasi nilai Perolehan Peralatan dan mesin Per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

- Saldo Awal 1-1-2024	Rp	8.209.035.085,00
- Penambahan Tahun 2024	Rp	99.458.000,00
- Saldo Akhir 31-12-2024	Rp	8.308.493.085,00

Mutasi penambahan tahun 2024 sebesar Rp99.458.000,00 berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

No	Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	Tahun		Penambahan
		2024	2023	(Pengurangan)
1	Alat Angkutan	554.774.600	554.774.600	0,00
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.468.500	1.468.500	0,00
3	Alat Pertanian	15.500.000	15.500.000	0,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.098.087.683	1.098.087.683	0,00
5	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.204.393.975	4.204.393.975	0,00
6	Alat Laboratorium	291.830.000	291.830.000	0,00
7	Alat Persenjataan	1.270.950	1.270.950	0,00
8	Komputer	2.131.897.076	2.032.439.076	99.458.000,00
9	Alat Eksplorasi	9.270.300	9.270.300	0,00
JUMLAH		8.308.493.084	8.209.035.084	99.458.000,00

2) Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp1.667.430.000,00

Saldo Akhir pada OPD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.667.430.000,00

Mutasi nilai Perolehan gedung dan bangunan Per 31 Desember 2024,
sebagai berikut:

- Saldo Awal 1-1-2024	Rp	1.667.430.000,00
- Penambahan Tahun 2024	Rp	0,00
- Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
- Saldo Akhir 31-12-2024	Rp	1.667.430.000,00

Rincian Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut :

No.	Aset Tetap (Jalan, Jaringan dan Irigasi)	Tahun		Penambahan
		2024	2023	(Pengurangan)
1	Jaringan Telepon di atas Tanah	1.667.430.000,00	1.667.430.000,00	0,00
Jumlah		1.667.430.000,00	1.667.430.000,00	0,00

3) Aset Tetap Lainnya Rp428.664.000,00

Saldo Akhir pada OPD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Per 31 Desember 2024 sebesar Rp428.664.000,00

4) Akumulasi Penyusutan (Rp810.869.035,00)

Akumulasi Penyusutan (accumulated depreciaton) adalah bagian dari biaya Perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Aset Tetap disusutkan sejak aktiva tersebut diperoleh.

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Maluku Utara
pada OPD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Per 31 Desember
2024 sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan 1-1-2024	Rp	-810.869.035,00
- Beban Penyusutan 2024	Rp	
- Akumulasi Penyusutan 31-12-2024	Rp	-810.869.035,00

III. Aset Lainnya Rp15.873.000,00

Aset lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya Perolehan semua aset lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset yang telah diuraikan sebelumnya. Aset lainnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara Per 31 Desember 2024 adalah Rp15.873.000,00.

3.2.2. Kewajiban Rp1.353.131.832,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari Peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku Utara Per 31 Desember 2024 adalah Rp1.353.131.832,00.

3.2.3. Ekuitas Rp8.269.792.551,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas OPD

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Per 31 Desember 2024 sebesar
Rp8.269.792.551,00

3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara dalam satu periode pelaporan. Informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan – LO	0	0	0	
2	Beban	17.736.723.341	11.861.033.509	5.875.689.832	49,54
	SURPLUS/DEFISIT-LO	-17.736.723.341	-11.861.033.509	-5.875.689.832	49,54

3.3.1. Pendapatan

Pendapatan LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan pajak daerah, pendapatan DAK, dan DAU.

2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan retribusi daerah.

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Adapun pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer.

Akuntansi Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

3.3.2. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Beban Operasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara untuk Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp17.736.723.341,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai - LO	5.287.029.360	4.508.566.473	778.462.887	17,27
2	Beban Barang dan Jasa	12.099.693.981	7.352.467.036	4.747.226.945	64,57
3	Beban Hibah	350.000.000	0	350.000.000	100
JUMLAH		17.736.723.341	11.861.033.509	5.875.689.832	49,54

Beban Operasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.325.318.274, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Operasi	17.736.723.341	11.861.033.509	5.875.689.832	49,54
JUMLAH		17.736.723.341	11.861.033.509	5.875.689.832	49,54

I. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp5.287.029.360,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2024
1	Beban Gaji Pokok PNS	2.229.142.073
2	Beban Tunjangan Keluarga PNS	207.984.328
3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	184.100.000
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	11.220.000
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	81.830.000
6	Beban Tunjangan Beras PNS	131.876.820
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.961.586
8	Beban Pembulatan Gaji PNS	34.009
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	93.460.809
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.603.986
11	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	13.811.974
12	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.203.283.775
13	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	120.720.000
JUMLAH		5.287.029.360

II. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp12.099.693.981,00 dengan rincian sebagai berikut :

Catatan atas Laporan Keuangan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Provinsi Maluku Utara

No	Uraian	2024
1	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.659.000
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	259.815.100
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	55.040.000
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	110.000.000
7	Beban Makanan dan Minuman Rapat	492.679.900
8	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	28.320.000
9	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.015.000
10	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0
11	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	130.150.000
12	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	498.000.000
13	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24.600.000
14	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	216.000.000
15	Beban Jasa Tenaga Ahli	640.900.000
16	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	9.000.000
17	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	99.999.900
18	Beban Tagihan Listrik	0
19	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.199.094.510

Catatan atas Laporan Keuangan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Provinsi Maluku Utara

20	Beban Lembur	170.700.000
21	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	77.122.700
22	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.000.000
23	Beban Sewa Peralatan Umum	0
24	Beban Sewa Komputer Jaringan	1.315.322.562
25	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	120.000.000
26	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	180.000.000
27	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0
28	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	149.966.417
29	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.020.238.798
30	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.130.000
31	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	135.400.000
32	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0
33	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.949.540.094
JUMLAH		12.099.693.981

III. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan saldo Beban Hibah Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp12.099.693.981,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2024
1	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	350.000.000
JUMLAH		350.000.000

3.3.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan – LO	0	0	0	
2	Beban	17.736.723.341	11.861.033.509	5.875.689.832	49,54
	SURPLUS/DEFISIT-LO	-17.736.723.341	-11.861.033.509	-5.875.689.832	49,54

3.3.4. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 defisit sebesar Rp(17.736.723.341,00). Surplus/Defisit Laporan Operasional selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan – LO	0	0	0	
2	Beban	17.736.723.341	11.861.033.509	5.875.689.832	49,54
	SURPLUS/DEFISIT-LO	-17.736.723.341	-11.861.033.509	-5.875.689.832	49,54

3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit- LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

3.4.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp8.269.792.551,00 dan Rp.8.154.461.551,00

3.4.2. SURPLUS DEFISIT (LO)

Surplus Desifisit (LO) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp17.736.723.341,00) dan (Rp11.861.033.509,00) yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit LO.

3.4.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2023. Koreksi-koreksi tersebut yaitu sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--------------------------|----|------|
| a. | Koreksi Nilai Persediaan | Rp | 0,00 |
| b. | Akumulasi Amortisasi | Rp | 0,00 |
| c. | Koreksi Ekuitas Lainnya | Rp | 0,00 |

a) Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan koreksi Nilai Persediaan di Tahun 2023 sebesar Rp0.00.

b) Akumulasi Amortisasi

Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan Akumulasi Amortisasi di tahun 2023 sebesar Rp0,00.

c) Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan Koreksi Ekuitas lainnya di tahun 2023 sebesar Rp0,00.

3.4.4. EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Ekuitas untuk dikonsolidasikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp17.852.054.341,00 dan Rp12.669.112.223,00.

3.4.5. EKUITAS AKHIR

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara menyajikan Ekuitas Akhir Tahun Buku 2024 adalah sebesar Rp8.269.792.551,33.

BAB IV

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan berbasis akrual, pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna dan tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara di masa yang akan datang, terima kasih.

Sofifi, 08 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Provinsi Maluku Utara,



Drs. IKSAH R. A ARSAD, M.SI

NIP. 19691107 200112 1 004